





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT. atas berkat rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Pelaksanaan penelitian dan laporan hasil penelitian sesuai judul itu. Salawat dan salam, kami samapaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga, kita sebagai umatnya dapat mengamalkan ajaran Islam yang telah beliau risalahkan, kita memperoleh syafa'atnya, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akherat.

Pelaksanaan penelitian merupakan bagian dari melestarikan tradisi keilmuan Islam, dalam tataran tekstual dan kontekstual sehingga mutu hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya teori-teori sain dalam Islam sekaligus pengembangannya dalam realitas kehidupan sosial. Penelitian judul tersebut, yang telah diselesaikan, agar mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan kemajuan peradaban yang berbasis nilai Islam.

Pelaksanaan penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, dan khususnya Lembaga Penelitian IAIN Raden Intan Lampung. Kami berharap, laporan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan dan berguna bagi pembangunan dan masyarakat. Kami juga berharap, hasil penelitian ini untuk dijadikan bahan bagi pengambil kebijakan dalam rencana program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat berbasis hasil riset ilmu-ilmu Islam yang multidisipliner.

Demikian, semoga hasil penelitian ini terealisasi sebagai amal ibadah, memperkaya keilmuan Islam, bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat, meski masih ada kekurangannya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Desember 2011  
Tim Peneliti,



# **PENYELESAIAN KEPAILITAN MENURUT SISTEM HUKUM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

## **ABSTRAK**

Setiap hubungan hukum perkreditan atau utang-piutang mewajibkan debitur sebagai pengusaha untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Apabila debitur tidak membayar utangnya padahal sudah diperingatkan secara patut, kreditor dapat menempuh upaya hukum mengajukan permohonan pailit terhadap debitor melalui pengadilan, baik menurut sistem hukum ekonomi Islam maupun sistem hukum perundang-undangan Indonesia. Masalahnya adalah bagaimana konsep kepailitan menurut sistem hukum ekonomi Islam dan sistem hukum perundang-undangan Indonesia, bagaimana penyelesaian kepailitan dan akibat hukumnya menurut kedua sistem hukum, serta bagaimana perlindungan debitor dan kreditor menurut Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perundang-Undangan Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep kepailitan dan penyelesaian kepailitan serta akibat hukumnya menurut sistem hukum ekonomi Islam maupun sistem hukum perundang-undangan Indonesia. Hasil penelitian ini secara teoritis berguna sebagai bahan kajian dalam pengembangan hukum bisnis, khususnya mengenai kepailitan dan secara praktis dapat menjadi upaya menengahi kontroversi yang tajam yang sedang berlangsung kini antara pihak yang pro dan kontra terhadap penerapan syari'at Islam di Indonesia, termasuk juga upaya penerapan penyelesaian masalah kepailitan.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari Undang-undang Kepailitan Indonesia dan hukum Islam serta literatur ilmu hukum perundang-undangan dan literatur hukum Islam yang berkenaan dengan kepailitan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif yang mengkaji unsur-unsur perbandingan antara kedua sistem hukum. Hasil kajian dianalisis secara kualitatif.



Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh jawaban komprehensif atas permasalahan sebagai berikut : **Pertama**, menurut hukum perundang-undangan Indonesia bahwa syarat debitur dapat dinyatakan pailit apabila mempunyai paling sedikit dua kreditor dan tidak membayar lunas utangnya yang sudah jatuh tempo, sedangkan menurut hukum ekonomi Islam bahwa syarat seorang debitur dinyatakan pailit tidak harus mempunyai dua atau lebih kreditor, tetapi seorang kreditor pun sudah bisa dinyatakan pailit. **Kedua**, menurut hukum perundang-undangan Indonesia dan hukum ekonomi Islam bahwa barang-barang yang terkena pailit adalah semua barang atau harta kekayaan debitur pailit yang mempunyai nilai tinggi (barang-barang sekunder) dan bukan barang-barang yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup (barang-barang primer). **Ketiga**, menurut hukum perundang-undangan Indonesia dan hukum ekonomi Islam bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan masalah kepailitan adalah Pengadilan Niaga, kecuali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditor) maka masalah kepailitan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau dapat juga diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). **Keempat**, menurut hukum perundang-undangan Indonesia bahwa debitur yang sudah dinyatakan pailit harus diawasi secara terus menerus baik oleh kurator, panitia kreditor maupun hakim pengawas, sedangkan menurut hukum ekonomi Islam bahwa debitur meskipun sudah dinyatakan pailit tidak perlu diawasi secara terus menerus, melainkan diberikan kesempatan untuk mencari rizki sampai ia mampu membayar atau melunasi utangnya. **Kelima**, menurut hukum perundang-undangan Indonesia dan hukum ekonomi Islam bahwa akibat kepailitan menyebabkan debitur pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. **Keenam**, menurut hukum ekonomi Islam dan hukum perundang-undangan Indonesia bahwa ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan debitur adalah persyaratan pernyataan pailit melindungi debitur yang solven, perdamaian mengakhiri kepailitan dan debitur dibebaskan dari pengampunan serta pembebasan utang debitur dilakukan atas dasar keikhlasan kreditor.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
1. Kerangka Teoritis .....	10
2. Konseptual .....	12
 <b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	16
B. Data dan Sumber Data .....	16
C. Pengumpulan Data .....	17
D. Pengolahan Data .....	17
E. Analisis Data .....	18
F. Sistematika Penulisan .....	18
 <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Hukum Indonesia .....	20
B. Hukum Ekonomi Islam .....	29
C. Hukum Perundang-undangan .....	35
1. Pengertian Perundang-undangan .....	35
2. Letak Perundang-undangan Dalam Rangka Hukum Pada Umumnya .....	36
3. Landasar Perundang-undangan .....	38
4. Tata Urutan Perundang-undangan .....	39
5. Proses Pembentukan Undang-undang (Proses Perundang-undangan) .....	40
D. Pengadilan Niaga .....	43
E. Kepailitan dan Akibat Hukumnya .....	54



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Konsep Kepailitan Menurut Sistem Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perundang-undangan Indonesia.....	57
1. Menurut Sistem Hukum Ekonomi Islam.....	57
a. Definisi Kepailitan.....	57
b. Syarat Kepailitan .....	63
2. Menurut Hukum Perundang-Undangan Indonesia.....	66
a. Definisi Kepailitan.....	66
b. Syarat Kepailitan .....	68
B. Penyelesaian Kepailitan dan Akibat Hukumnya .....	74
1. Menurut Hukum Ekonomi Islam.....	74
a. Subjek Hukum Kepailitan .....	74
b. Objek Hukum Kepailitan.....	77
c. Peristiwa Hukum Kepailitan.....	80
d. Pengadilan Yang Berwenang .....	82
e. Putusan Pengadilan.....	85
2. Menurut Sistem Hukum Perundang-undangan Indonesia.....	88
a. Subjek Hukum Kepailitan .....	88
b. Objek Hukum Kepailitan.....	93
c. Peristiwa Hukum Kepailitan.....	95
d. Pengadilan Yang Berwenang .....	97
e. Keputusan Pengadilan Niaga.....	100
C. Perlindungan Debitor dan kreditor dalam penyelesaian kepailitan menurut hukum ekonomi islam dan hukum perundang-undangan Indonesia .....	101
1. Pengampunan dokenakan kepada debitor yang tidak membayar utangnya.....	101
2. Perdamaian antara Kreditor dan Debitor mengakhiri Kepailitan debitor dibebaskan dari pengampunan.....	112
3. Pembebasan utang Debitor atas dasar Keikhlasan Kreditor.....	120



D. Analisis Perbandingan Tentang Kepailitan Menurut Sistem Hukum Ekonomi Islam dan Sistem Hukum Perundang-undangan Indonesia.....	126
1. Konsep Kepailitan Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perundang-undangan Indonesia.....	126
2. Penyelesaian Kepailitan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perundang-undangan Indonesia.....	132
3. Perlindungan debitor dan kreditor menurut hukum ekonomi Islam dan hukum perundang-undangan Indonesia .....	137

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	139
B. Saran (Rekomendasi).....	141

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Fattlissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*).

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini dan mengingat modal yang dimiliki oleh pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman



modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang-piutang dalam masyarakat. Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesutitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang. Untuk itu diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya, sehingga dapat menyelesaikannya secara adil, cepat, terbuka dan efektif sesuai dengan harapan semua pihak.

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 22 April 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan



*(Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348}* yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 bukan merupakan Undang-undang Kepailitan yang baru melainkan hanya sekedar mengubah dan menambah *faillissements verordening staatblad 1905 : 217' juncto Staatsblad 1906:34*.

Perubahan terhadap Undang-undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi mated yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditur dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan debitor sendiri, maupun kepentingan para kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk

membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang.

Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitor atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seseorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang. Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor (lihat penjelasan umum atas UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan).

Sebagai gambaran berikut ini penulis kemukakan kasus Manulife, dimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan tanggal 13 Juni 2002 mengabulkan permohonan PT Dharmala Sakti Sejahtera untuk memailitkan PT Asuransi Jiwa Manulife. Kontroversi pun merebak,



betapa tidak, pada saat dipailitkan, perusahaan asuransi yang 51% sahamnya dikuasai oleh Manulife Financial Corporation dari Kanada itu sesungguhnya memiliki keadaan keuangan yang cukup baik. Meskipun akhirnya putusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, kontroversi seputar aspek hukumnya terus berlanjut. Kasus Manulife ini dipandang sebagai bukti kelemahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam menetapkan syarat kepailitan. Ini bukan satu-satunya kelemahan dalam Undang-undang Kepailitan tersebut, masih ada kelemahan lain seperti tidak adanya definisi tentang apa itu debitor, kreditor dan utang, serta tidak ditetapkan sanksi pidana bagi debitor dan kreditor yang berbuat curang.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Untuk itu lahirlah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan pembayaran Utang.

Menurut hukum Islam (fiqh), istilah pailit dapat diartikan seseorang yang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar utang-utangnya, sedangkan orang yang pailit disebut *muflis*, dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang jatuh bangkrut (pailit) dinamakan *tajlis*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Edisi II, Ichtiar Van Hoeven, Jakarta, 1994, hal. 1361.



Lebih jauh, Islam telah memberikan tata cara dalam mengatasi persoalan kepailitan, yakni keputusan dan tindakan hakim menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran hutang. Dalam istilah fiqh, hal tersebut disebut *hijr* dan hakim berwenang mempertimbangkan dan memutuskan seseorang itu (debitor) telah pailit secara adil dan menahan hartanya yang masih ada untuk kepentingan pemberesan utang dari orang yang berhutang (*Al-gharimuri*).

Hal ini sebagaimana dijelaskan dan dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>2</sup>

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia kelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua harta) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Dalam Hadis Rasulullah saw. juga dinyatakan:<sup>3</sup>

عَنْ أَبِي الْمَعْتَمِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خُلَدَةَ قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَقْلَسَ فَقَالَ لَا قُضِينَ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَقْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَنَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (رواه ابن ماجه)

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989, hal.287

<sup>3</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, Maktabah al-Dahlan Indonisiyi, t.t, hal.287.

Artinya : Dari Abi Mu'tamir dan Umar bin Khalda, dia berkata : "Pernah kami mendatangi Abu Hurairah pada waktu dia ada pada seseorang teman kami yang bangkrut (pailit). Maka Abu Hurairah berkata : 'Sesungguhnya akan kuputuskan kepada kalian dengan putusan hukum Rasulullah saw., barang siapa yang bangkrut atau mati lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri dengan utuh pada yang bangkrut, sedangkan kreditor itu lebih berhak kepada barang itu daripada lainnya'" (HR. Ibnu Majah).

Untuk lebih jelasnya pengaturan kepailitan menurut hukum ekonomi Islam dapat dilihat dari kasus Muaz bin Jabal. Sebuah riwayat menyatakan bahwa Rasulullah saw. menetapkan Muaz bin Jabal (603 - 639 M) sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya (pailit). Kemudian Rasulullah saw. melunasi utang Muaz bin Jabal dengan sisa hartanya. Akan tetapi karena yang berpiutang merasa tidak menerima piutangnya sepenuhnya, maka mereka melakukan protes kepada Rasulullah saw. Protes ini dijawab Rasulullah saw. dengan mengatakan "tidak ada yang bisa diberikan kepada kamu selain itu."

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa masalah kepailitan merupakan masalah yang menarik untuk dikaji dan ditangani segera, karena masalah kepailitan sering terjadi dalam masyarakat khususnya dalam dunia usaha saat ini, guna untuk membenkan jaminan hukum yang kuat. Dengan demikian peneliti merasa terpanggil untuk memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya dapat berguna baik untuk



kepentingan praktisi maupun teoritis. Oleh sebab itu, peneliti perlu menghindari sikap spekulatif dan apriori, yaitu sikap pemihakan kepada salah satu sistem hukum (Hukum Ekonomi Islam dan Undang-undang No.37 Tahun 2004). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti melakukan studi komparatif tentang penyelesaian kepailitan menurut Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perundang-Undangan Indonesia (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kepailitan menurut sistem hukum ekonomi Islam dan sistem hukum perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian kepailitan dan akibat hukumnya menurut sistem hukum ekonomi Islam dan sistem hukum perundang-undangan Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan terhadap debitor dan kreditor dalam penyelesaian kepailitan menurut hukum ekonomi Islam dan hukum perundang-undangan Indonesia?

Penelitian ini termasuk lingkup bidang hukum bisnis, khususnya mengenai peristiwa hukum kepailitan, sedangkan lingkup substansinya terbatas pada dua hal yaitu konsep kepailitan dan penyelesaian kepailitan serta akibat hukumnya menurut sistem hukum ekonomi Islam dan sistem hukum perundang-undangan Indonesia seperti yang telah dirumuskan dalam permasalahan.



## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif :

- a. Konsep kepailitan menurut sistem hukum ekonomi Islam dan sistem hukum perundang-undangan Indonesia;
- b. Penyelesaian kepailitan dan akibat hukumnya menurut sistem hukum ekonomi Islam dan sistem hukum perundang-undangan Indonesia.
- c. Perlindungan debitor dan kreditor dalam penyelesaian kepailitan menurut hukum ekonomi Islam dan hukum perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh bahan hukum yang dideskripsikan secara lengkap, komprehensif dan sistematis sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai kajian hukum dalam rangka pengembangan hukum bisnis, khususnya mengenai peristiwa hukum kepailitan. Kajian tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan hukum dan penelitian hukum, yang bertungsi sebagai sumbangan pemikiran, baik dari segi hukum ekonomi Islam maupun dari segi hukum perundang-undangan Indonesia

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai masukan bagi upaya menengahi kontroversi yang tajam yang sedang berlangsung kini antara

piliak yang pro dan kontra terhadap penerapan syari'ah Islam di Indonesia, termasuk juga upaya penerapan penyelesaian masalah kepailitan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Untuk menjawab permasalahan secara ilmiah, perlu menggunakan teori yang tepat yang dapat mengungkapkan hal-hal yang diperlukan dalam kajian. Teori yang dianggap lebih sesuai adalah teori kajian komparatif antara dua sistem hukum yang berbeda. Teori kajian komparatif berusaha mengidentifikasi faktor-faktor perbandingan yang dijadikan dasar analisis kedua sistem hukum menjadi objek penelitian.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor perbandingan tersebut, dapat dimmuskan unsur-unsur perbandingan yang dapat dijadikan landasan dalam pengkajian faktor-faktor perbandingan antara kedua sistem hukum. Faktor-faktor perbandingan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Konsep kepailitan menurut sistem hukum ekonomi Islam dan sistem hukum perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan konsep kepailitan tersebut dapat diungkapkan unsur-unsur dalam konsep yang dijadikan landasan perbandingan kajian tentang kepailitan menurut kedua sistem hukum yang menjadi objek penelitian. Unsur-unsur konsep perbandingan yang dimaksud merupakan dasar jawaban terhadap masalah pertama.



b. Penyelesaian kepailitan dan akibat hukumnya menurut sistem hukum ekonomi Islam dan sistem hukum perundang-undangan Indonesia. Atas dasar roses kepailitan dan akibat hukumnya dapat diungkapkan beberapa faktor perbandingan, yaitu:

- 1) Subjek hukum kepailitan, yaitu siapa pihak yang dinyatakan pailit dan siapa pihak yang mengajukan permohonan pailit dan apa status hukumnya menurut kedua sistem hukum yang menjadi objek peneiitian.
- 2) Objek hukum kepailitan, yaitu harta apa saja yang dikenai kepailitan menurut kedua sistem hukum yang menjadi objek penelitian.
- 3) Peristiwa hukum kepailitan, yaitu apa saja persyaratan pengajuan permohonan kepailitan dan bagaimana prosedur pengajuan kepailitan menurut kedua sistem hukum yang menjadi objek penelitian.
- 4) Pengadilan yang berwenang, yaitu pengadilan mana saja yang berwenang menyelesaikan perkara kepailitan, bagaimana kewenangannya dan hukum acara perdata mana yang diterapkan dalam proses penyelesaian kepailitan menurut kedua sistem hukum yang menjadi objek penelitian.
- 5) Keputusan pengadilan yang berwenang, yaitu bagaimana kekuatan hukum putusan kepailitan, siapa yang berhak mengeksekusi putusan dan apa akibat hukum kepailitan menurut kedua sistem hukum yang menjadi objek penelitian.

Kelima faktor perbandingan tersebut di atas menjadi dasar jawaban masalah kedua dalam penelitian ini.

## 2. Konseptual

Setiap penelitian hukum selalu menggunakan konsep-konsep hukum yang berfungsi menjelaskan dan sekaligus membatasi lingkup masalah penelitian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, ada beberapa konsep yang digunakan, yaitu seperti tertera berikut ini :

### a. Studi komparatif

Studi komparatif merupakan gabungan dari dua kata studi dan komparatif. Studi memiliki dua makna/arti: (1) pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan, misalnya "ia akan melanjutkan studinya di luar negeri"; (2) penyelidikan, misalnya "sarjana asing itu tertarik untuk melakukan studi mengenai adat istiadat dan kebudayaan penduduk di pulau itu".<sup>4</sup> Jadi, studi dapat diartikan upaya mempelajari, menyelidiki dan meneliti. Sedangkan komparatif berasal dari bahasa Inggris *comparison* yang berarti perbandingan atau hal membandingkan. Perbandingan berasal dari kata dasar banding; perbandingan berarti perimbangan (antara beberapa atau perkara) misalnya "perbandingan gaji pegawai yang tertinggi dengan yang pegawai yang terendah ada 17 dengan 1". Dengan demikian studi komparatif dalam penelitian ini berarti suatu upaya untuk mempelajari, menyelidiki dan meneliti dengan cara

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Ictiar Van Hoeven, Jakarta, 1994, hal.



melakukan pembahasan dengan perbandingan atau membandingkan atau menimbang/mempertimbangkan sesuatu objek dengan satu objek yang lainnya.

Jadi yang dimaksud studi komparatif dalam penelitian ini adalah suatu ; upaya mempelajari, menyelidiki, meneliti dan menganalisis masalah kepailitan dan penyelesaiannya menurut hukum ekonomi Islam dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan cara membandingkan keduanya (dua sistem hukum).

#### **b. Kepailitan**

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitor mengalami jatuh bangkrut dalam usahanya, sehingga tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor dan itu pun harus dengan putusan pengadilan.

#### **c. Sistem Hukum**

Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku. Sementara menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa sistem hukum adalah suatu kumpulan asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib

hukum.<sup>5</sup> Dengan demikian peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat berarti merupakan suatu sistem hukum.

**d. Hukum Ekonomi Islam**

Hukum ekonomi Islam adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah ekonomi yang didasarkan pada ajaran agama Islam atau nilai-nilai Islam yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadis.

**e. Hukum perundang-undangan**

Hukum perundang-undangan adalah hukum yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Yang dimaksudkan di sini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

**f. Penyelesaian Kepailitan**

Penyelesaian Kepailitan adalah suatu usaha atau perbuatan untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkenaan dengan seseorang atau badan hukum (debitor) yang mengalami jatuh bangkrut atau jatuh miskin dalam usahanya.

---

<sup>5</sup> Muchsin, *Ikhtisar Hukum*, STIH IBLAM, Surabaya, 2004, hal.6

<sup>6</sup> Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2002, hal.69.



### **g. Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum, misalnya utang-piutang antara debitor dengan kreditor itu merupakan hubungan hukum yang memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak, dimana debitor berkewajiban membayar utang dan kreditor berhak menerima pengembalian utang.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji asas-asas hukum yang berkenaan dengan kepailitan menurut dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum ekonomi Islam dan sistem hukum perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor perbandingan yang berkenaan dengan kepailitan untuk dijadikan dasar pengkajian menurut kedua sistem hukum yang diteliti.

Tipe penelitian hukum ini adalah deskriptif, yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas, rinci, komprehensif dan sistematis mengenai hasil pengkajian sesuai dengan bentuk dan format tesis sebagai karya ilmiah.

#### **2. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer bersumber dari perundang-undangan, al-Qur'an dan al-hadits. Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Al-Qur'an yang dimaksud adalah QS Al-Baqarah ayat 280.



- b. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku literatur ilmu hukum dan jurnal penelitian, khususnya yang berkenaan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tertier yang bersumber dari kamus dan ensiklopedi.

### **3. Pengumpulan Data**

Mengingat bahwa sumber data terdiri dari bahan-bahan hukum yang tersimpan di dalam perundang-undangan, Al-Quran dan Hadis, literatur-literatur hukum umum dan Islam, laporan-laporan penelitian, kamus, ensiklopedi dan sejenisnya, maka pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mempelajari segala peraturan yang berlaku di setiap perpustakaan.
- b. Mengetahui sistem pelayanan yang berlaku pada setiap perpustakaan.
- c. Memeriksa bahan-bahan hukum apa yang tersedia di perpustakaan.
- d. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip bahan-bahan hukum yang diperlukan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### **4. Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan data apakah sudah lengkap, cukup sesuai dengan kebutuhan penelitian atau belum cukup? Juga mengoreksi data apakah data yang terkumpul tidak ada lagi kesalahan, apa sudah benar semua?

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Hukum Indonesia

Kumpulan peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat bisa dikatakan sebagai suatu sistem hukum apabila peraturan-peraturan hukum tersebut memenuhi beberapa asas (*principle of legality*)<sup>1</sup>, yaitu :

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan, tidak boleh mengandung sekedar keputusan ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan.
3. Peraturan-peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama yang lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan, sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

---

<sup>1</sup> Muchsin, *Ikhtisar Hukum*, STIH Iblam, Surabaya, 2004, hal.6.



Pada dasarnya sistem hukum Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum barat dan sistem hukum Islam.<sup>2</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian sebagai berikut:

### 1. Sistem hukum adat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, adat berarti kebiasaan, aturan atau perbuatan yang lazim dan diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Sementara Kusumadipudjosewojo mengartikan adat sebagai tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan.

Dalam sistem hukum adat salah satu sifatnya adalah komunal, adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.<sup>3</sup> Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelis Snouck Hoorgronje di Indonesia dari bahasa Belanda "*Adatreeht*" yang selanjutnya dipakai oleh Van Vollenhoven dengan istilah "tennis juridis".<sup>4</sup> Istilah hukum adat bam muncul dalam perundang-undangan tahun 1920, yaitu dalam penmdang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda. Dalam bukunya *De Atjeheis* yang menampilkan istilah *Adatreeht* pada tahun 1893, Snouck menunjukkan hukum yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Soerjono Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 13.

<sup>4</sup> <sup>4</sup> Btlshar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradya Paramita, Jakarta, 1994, hal.2.

mengendalikan kehidupan masyarakat Aceh adalah adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Karena itu dalam teorinya yang terkenal yaitu *receptie* yang diberlakukan Belanda menegakkan hukum Islam hanya berlaku bagi orang Indonesia apabila ia telah diterima oleh hukum adat.

Hukum adat adalah hukum non statutair, dimana sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Karena itu dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975 menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.

Keberadaan hukum adat di Indonesia juga tidak lepas dari campur tangan penjajah Belanda, meskipun di beberapa daerah sudah ada hukum adat yang berlaku sebelum ada penjajah Belanda, misalnya Aceh sudah mengenal hukum potong tangan bagi seorang pencuri, hukuman mati bagi seorang istri yang melakukan perzinahan dan lain-lain. Sedangkan campur tangan Belanda dapat dilihat dari *pepakem* Cirebon yang merupakan pegangan bagi hakim-hakim peradilan adat, yang berisikan tentang sistem hukuman seperti pemukulan, cap bakar, dirantai dan lain-lain.



## 2. Sistem hukum barat

Sistem hukum barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik. Perjalanan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia sendiri yang mengalami penjajahan dari bangsa Belanda hingga 35 tahun lamanya. Selain itu juga pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Inggris, Spanyol dan Portugis meskipun kurun waktunya sangat pendek.

Dengan adanya penjajahan tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap sistem hukum Indonesia, karena para penjajah menggunakan sistem hukumnya sendiri-sendiri untuk diterapkan di negara jajahannya. Melihat kenyataan tersebut, sudah sewajarnya kalau sistem hukum kolonial masih begitu banyak diadopsi dan mewarnai Undang-undang di negara Indonesia. Sebagai contoh dalam *burgerlijk wetboek* atau dikenal dengan BW merupakan peninggalan penjajah yang mengatur hukum privat (perdata), sampai saat ini belum ada hukum perdata Indonesia.

Berlakunya BW tersebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata didasarkan pada prinsip *concordance* yaitu prinsip penyesuaian di daerah hukum negara Republik Indonesia. Asas ini tercantum dalam pasal 131 yang menyatakan bahwa bagi setiap orang Eropa yang ada di Hindia Belanda/Indonesia, diberlakukan hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda dan yang berlaku di negeri

Belanda adalah BW. Sedangkan dasar berlakunya BW Indonesia sampai sekarang adalah Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

### 3. Sistem hukum Islam

Menurut sejarah bahwa Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriyah, ada pula yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriyah atau pada ke-13 Masehi. Yang jelas Islam datang sekaligus hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya di Indonesia.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada pertengahan abad ke-14 Masehi telah muncul seorang ahli agama dan hukum Islam dari Samudera Pasai yang bernama Sultan Malikul Zahir dan para ahli hukum kerajaan Malaka yang datang ke Samudera Pasai untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum<sup>5</sup>. Bahkan kenyataan lain telah diakui oleh Belanda, setelah melihat pemberontakan terhadap penjajahnya. Perang Diponegoro yang begitu dahsyat terayata merupakan perlawanan untuk menegakkan hukum Islam. Hal ini terlihat dari pengakuan seorang letnan kolonel Belanda pada masa

---

<sup>5</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999, hal.69.



perang Diponegoro yang mengisahkan bahwa tujuan perlawanan orang Jawa terhadap Belanda sebenarnya adalah agar hukum Islam berlaku untuk orang Jawa.

Bahkan sebenarnya sejak zaman VOC, Belanda sudah mengakui hukum Islam di Indonesia. Adanya *Regerings Reglemen*, mulai tahun 1854 Belanda mempertegas pengakuannya terhadap hukum Islam di Indonesia. Apalagi setelah diperkuat dengan teori *Receptio in Complexu* oleh Lodewijk Willem Cristian Vanden Berg. Meskipun pada akhirnya ada penyimpangan, namun teori tersebut telah menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk keseluruhan umat Islam.<sup>6</sup>

Sebagaimana diutarakan di atas, bahwa di Indonesia ada tiga sistem hukum, yakni sistem hukum adat, sistem hukum barat dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem itu diakui oleh perundang-undangan, tumbuh dalam masyarakat, dikembangkan dalam ilmu pengetahuan dan dipraktekkan pada peradilan Indonesia. Hukum Islam dipraktekkan di peradilan agama, sedangkan hukum adat dan hukum barat di pengadilan negeri.

Apabila diperbandingkan ketiga sistem hukum tersebut terdapat beberapa pokok perbedaan sebagai berikut:

1. Berdasarkan waktu berlakunya

---

<sup>6</sup> Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, hal.193.

- a. Hukum adat lebih dahulu berlaku di Indonesia sebelum hukum lainnya.
- b. Hukum barat dimulai sejak kedatangan orang Belanda yang memberlakukan hukum Eropa, Timur Asing dan hukum adat untuk bumiputera.
- c. Hukum Islam berlaku mulai abad ke-7 bersamaan masuknya Islam ke Indonesia.

## 2. Berdasarkan tujuannya

- a. Hukum adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.
- b. Hukum barat bertujuan untuk kepastian hukum dan keadilan individu.
- c. Hukum Islam bertujuan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahkan menurut Abu Ishak al-Shatibi terdapat 5 (lima) tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama (حِفْظُ الدِّينِ), memelihara jiwa (حِفْظُ النَّفْسِ), memelihara akal (حِفْظُ الْعَقْلِ), memelihara keturunan (حِفْظُ الْوَلَدِ) dan memelihara harta benda (حِفْظُ الْمَالِ).<sup>7</sup>

## 3. Berdasarkan sumbernya

- a. Sumber hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

---

<sup>7</sup> Ibid



- b. Sumber hukum barat adalah keamanan pembentuk perundang-undangan pemerintah Belanda/Hindia Belanda.
  - c. Sumber hukum islam adalah kemauan Allah berupa wahyu yang ada dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah.
4. Berdasarkan ruang-lingkup
- a. Ruang lingkup hukum adat dan hukum barat adalah sama, yaitu mengatur lahiriah antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat.
  - b. Ruang lingkup hukum Islam adalah mencakup hubungan lahir dan batin antara manusia dengan manusia, (حَبْلٌ مِنْ النَّاسِ), manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, ruang angkasa, planet-planet lainnya serta hubungan dengan Allah. (حَبْلٌ مِنْ اللَّهِ)
5. Berdasarkan pembedaannya
- a. Hukum adat mengenal asas kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaulan yang bersifat magis relegius dan tidak ada pemisahan yang tajam antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.
  - b. Pembedaan hukum Islam dapat digolongkan kedalam empat golongan, yaitu :
    - 1) *Hablumminallah* (hubungan manusia dengan Allah SWT).
    - 2) *Hablumminannas* (hubungan manusia dengan sesama).
    - 3) *Tarikh* (sejarah)
    - 4) *Al-Ahkam khuluqiyah* (akhlak sopan santun).

## B. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan atau masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam yang bersumber pada al-Quran dan sunnah Rasulullah. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun dan pedoman hidup memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa al-Quran dan sunnah Rasulullah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, termasuk seperti daya jangkau dan daya atur dalam bidang perekonomian umat.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (الاعراف: ١٠)

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amai sedikitlah kamu bersyukur"<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 222.



Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dikemukakan bahwa pada suatu waktu, beberapa orang sahabat Rasulullah melihat seorang laki-laki rakus dalam mendapatkan hartanya. Kejadian itu diketahui Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwa sikap rakus yang dimiliki, jika dilakukan atas nama Allah tentulah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Selanjutnya Rasulullah bersabda : "Ketahuilah bahwa jika dia berusaha (mendapatkan rizki) untuk keperluan keuda orang tuanya atau salah seorang dari mereka, maka dia berusaha karena Allah. Jika dia berusaha untuk mendapatkan rizki guna kepentingan orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya (seperti anak dan istri), dia berusaha karena Allah. Bahkan jika dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dia berusaha karena Allah. Allah maha besar dan maha agung".

Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah bersabda : "Berusahalah untuk memperoleh kehidupan dengan cara yang halal merupakan suatu kewajiban setelah kewajiban sembahyang". Bahkan semasa hidupnya Rasulullah sering memberikan nasihat ekonomi kepada kaum muslimin. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam sebuah hadis (riwayat Nasa'i) : "Berusahalah untuk mendapatkan perlindungan Tuhanmu dari kekafiran, kekurangan dan kehinaan".<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan al-Quran dan hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang

---

<sup>13</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Bumi aksara, Jakarta, 1991, hal.2.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari mengemukakan :  
 "Demi Allah aku tidak menghawatirkan akan kemiskinan, tetapi lebih menghawatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh. Lalu kamu saling berlomba mengadakan persaingan diantara sesamamu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu dan telah diberikan kemewahan juga. Hal itu akan membinasakan kamu sebagaimana ia telah membinasakan mereka"<sup>16</sup>

Adapun kegiatan ekonomi dalam perdagangan islam (hukum ekonomi Islam) bertujuan:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
2. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
5. Untuk memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.<sup>17</sup>

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan memberi

<sup>16</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Op.cit*, hal.3.

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.3.



3  
peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari.  
Sebab hukum Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam (hukum ekonomi Islam) telah memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Sedangkan hal-hal yang tidak diatur secara jelas (مَصْلَحٌ لِّكُلِّ مَكْنٍ وَتَرْمِينٌ) sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad.

Untuk melaksanakan ijtihad ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain sebagai berikut:

1. Ijma', yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu perkara yang tidak dijelaskan dalam al-Quran maupun sunnah Rasulullah.
2. Qiyas, yaitu menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dan kejadian itu dalam illat hukumnya.
3. Maslahah mursalah, yaitu yang bertumpu pada pertimbangan menari manfaat dan menghindarkan mudharat.
4. Ihtihsan, yaitu meninggalkan dalil-dalil yang khusus dan mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang lebih kuat.
5. Istishhab, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan as yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.
6. Urf, yaitu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan akal sehat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa : No Iskandar, Raja Grafindo persada, Jakarta, Hal. 133

## C. Hukum Perundang-undangan

### 1. Pengertian Perundang-undangan

Hukum perundang-undangan diartikan sebagai hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kenyataan telah menunjukkan bahwa begitu pentingnya perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Hal ini terlihat semakin besarnya bagian hukum tertulis di dalam perundang-undangan.

Jenis perundang-undangan tidak hanya produk-produk yang didasarkan kepada Undang-undang Dasar 1945, tetapi juga meliputi produk-produk zaman lampau (Hindia Belanda) yang masih berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan peralihan hukum dasar negara yang pernah berlaku di Indonesia.

Pengetahuan perundang-undangan dapat memberikan pengertian-pengertian antara lain :

- a. Tentang norma-norma hukum dan tata urutan hukum atau hirarkinya.
- b. Lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang perundang-undangan.
- c. Tata susunan norma-norma hukum negara Republik Indonesia.
- d. Jenis-jenis perundang-undangan serta dasar hukumnya.
- e. Asas dan syarat perundang-undangan.
- f. Teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.2



3

Pengetahuan perundang-undangan berfungsi sebagai bekal pelaksanaan tugas dibidang hukum yang meliputi :

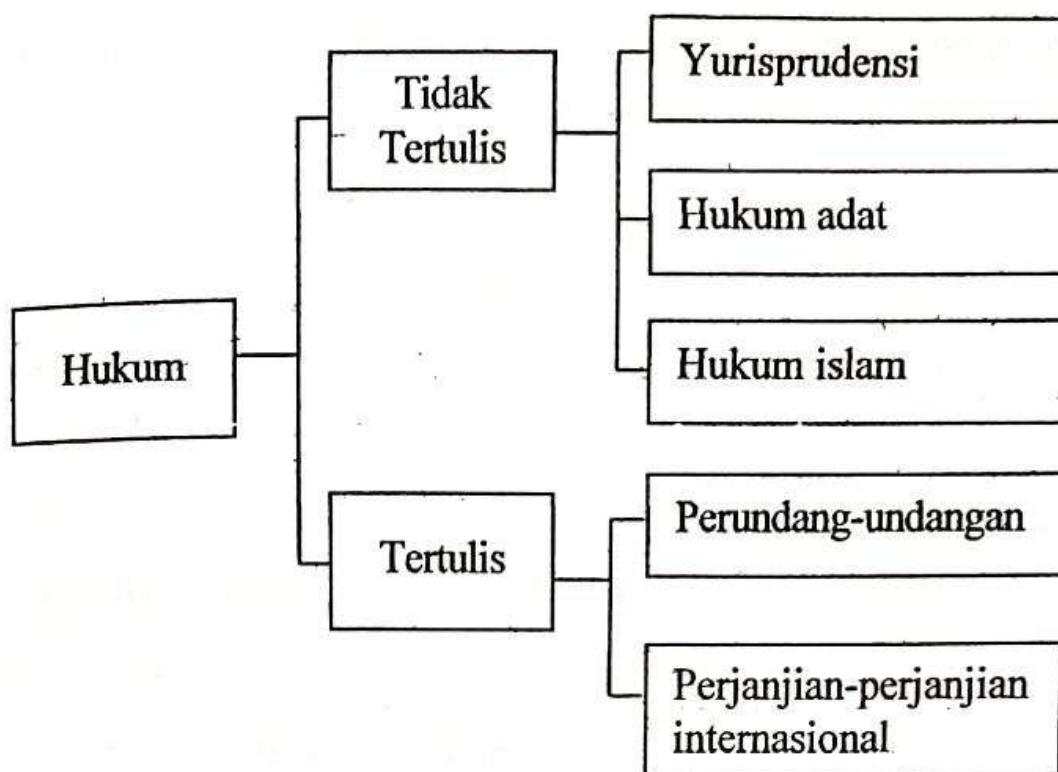
- a. Perencanaan hukum (*legal planning*)
- b. Rancangan peraturan-peraturan hukum (*law drafting*)

Mengingat masih banyaknya perundang-undangan warisan Belanda yang perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat Indonesia, maka perlu disiapkan:

- a. Rencana perundang-undangan sebagai pengganti yang lama.
- b. Rencana perundang-undangan mengenai hukum baru dalam hal-hal yang belum ada pengaturannya.

## **2. Letak Perundang-undangan Dalam Rangka Hukum Pa Umumnya**

Hukum pada umumnya merupakan serangkaian peraturan mengenai tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat yang bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Letak perundang-undangan dalam rangka hukum pada umumnya dapat dilihat dari skema berikut:



Hukum tidak tertulis dianggap sebagai aturan yang dipandang sebagai kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat dan diterima oleh masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari - hari, selama tidak bertentangan dengan peraturan -peraturan yang berlaku.

Sedangkan yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim mengenai sesuatu hal yang tidak langsung didasarkan kepada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang kemudian diikuti atau dituruti oleh para hakim lainnya.

Adapun hukum tertulis dipandang lebih lebih dapat memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) kepada masyarakat dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian jelaslah bahwa



perundang-undangan sebagai salah satu bentuk hukum tertulis menjadi lebih penting, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.<sup>20</sup>

### 3. Landasan Perundang-undangan

Menurut ilmu pengetahuan hukum, sekurang-kurangnya ada tiga landasan perundang-undangan :

#### a. Landasan filosofis

Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dikaji secara filosofis. Jadi ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Hal ini sesuai dengan cita-cita pandangan hidup, cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan bermasyarakat.

#### b. Landasan sosiologis

Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.

#### c. Landasan yuridis

Landasan yuridis disebut juga landasan hukum atau dasar hukum, yaitu landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuan-

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.4

ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua macam :

- 1) Landasan yuridis yang beraspek formal, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada badan pembentuknya, dan
- 2) Landasan yuridis yang beraspek material, yaitu ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.<sup>21</sup>

#### **4. Tata urutan Perundang-undangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan, bahwa tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- c. Peraturan Pemerintah (PP)
- d. Peraturan Presiden (Perpres)
- e. Peraturan Daerah (Perda)

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 95.



Keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini sekaligus menggantikan pengaturan hirarkis perundang-undangan yang ada di dalam TAP MPR No. III / 2000.

### **5. Proses Pembentukan Undang-Undang (Proses Perundang-undangan)**

Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970, bahwa proses perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen mempersiapkan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah sesuai bidang masing-masing.
- b. Menteri atau Kepala Lembaga pemerintah Non Departemen melaporkan kepada Presiden tentang pokok-pokok materi dan meminta persetujuan presiden.
- c. Apabila disetujui Presiden, Menteri atau Kepala lembaga Pemerintah Non Departemen membentuk panitia. Dan apabila materinya menyangkut bidang Departemen lain atau Lembaga Pemerintah Non Departemen lain, maka dibentuk panitia antar Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- d. Hasil dari panitia tersebut diedarkan kepada Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan dan pertimbangan serta ditujukan kepada Sekretaris Kabinet untuk persiapan rancangan.

- e. Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan tersebut, Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
- f. Hasil yang sudah memperoleh kebulatan pendapat atas materi Rancangan undang-undang disampaikan kepada Presiden disertai penjelasan mengenai pokok materi dari rancangan serta proses penggarapannya. Setelah Sekretaris kabinet berpendapat, bahwa Rancangan Undang-undang telah selesai disusun dan dianggap sudah baik, maka diajukan kepada DPR untuk mendapatkan

Persetujuan dan kepada Presiden untuk ditanda tangani. Dan selanjutnya Menteri atau Sekretaris Negara mengundang melalui Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>22</sup>

#### **D. Pengadilan Niaga**

Pengadilan niaga bukanlah merupakan pengadilan baru sebagai tambahan pengadilan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan niaga hanyalah merupakan bagian dari peradilan umum, seperti halnya dengan pengadilan anak dan pengadilan lalulintas.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 141.



Oleh karena pengadilan niaga merupakan bagian dari (di lingkungan) peradilan umum, maka tidak ada jabatan ketua pengadilan niaga, sebab pengadilan negeri yang bersangkutan otomatis juga membawahi pengadilan niaga.<sup>23</sup>

Pengadaan pengadilan niaga dengan Undang-undang Kepailitan dimungkkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 8 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-undang. Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan" dalam pasal 8 Undang-undang ini adalah adanya diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, seperti Pengadilan Lalulintas, Pengadilan Anak dan Pengadilan Ekonomi (Niaga).

Pengadilan niaga pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Tentu saja pada saat ini pengadilan niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat telah banyak memeriksa dan memutuskan perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>24</sup>

Menurut Undang-undang Kepailitan, pembentukan pengadilan niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembentukan pengadilan niaga juga di tempat-tempat lain yang dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan

---

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal.147. 41

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 148

dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Dengan demikian sebelum pengadilan niaga di tempat-tempat lain terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan niaga diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saat ini selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga juga telah dibentuk di beberapa tempat, antara lain : Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun tujuan pembentukan Pengadilan Niaga adalah untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan perkara-perkara perekonomian atau perniagaan lainnya dengan pertimbangan kecepatan dan efektifitas. Perkara-perkara kepailitan menurut Undang-undang Kepailitan ditentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat Pengadilan Niaga, di tingkat Kasasi dan di tingkat Peninjauan Kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah langsung kasasi ke Mahkamah Agung tanpa upaya banding melalui Pengadilan Tinggi, sehingga untuk menyelesaikan perkara kepailitan akan berjalan lebih cepat apabila dibandingkan dengan pemeriksaan perkara biasa di Pengadilan Negeri.

Putusan perkara permohonan kepailitan akan lebih efektif, karena ketentuan Undang-undang Kepailitan putusan perkara permohonan kepailitan tersebut bersifat serta merta, artinya kurator telah dapat menjual harta pailit meskipun putusan pernyataan pailit tersebut belum



mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab terhadap putusan itu diajukan permohonan kasasi.

Menurut Undang-undang Kepailitan, permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Pada mulanya Pengadilan Niaga hanya memeriksa dan memutuskan perkara-perkara kepailitan saja. Namun pada saat ini telah pula memeriksa perkara-perkara hak atas kekayaan intelektual. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 280 Ayat (2), yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pengadilan Niaga juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Bahkan kewenangan pengadilan niaga akan diperluas, yaitu juga menangani perkara-perkara dalam bidang bisnis lainnya. seperti perkara-perkara yang menyangkut Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat serta Undang-undang Perlindungan Konsumen.<sup>25</sup>

Dengan demikian, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-undang Kepailitan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Sedangkan perkara-perkara lain yang menyangkut bidang perniagaan atau bisnis dapat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga tergantung dari ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 150.

## E. Kepailitan dan Akibat Hukumnya

Kepailitan menurut hukum ekonomi Islam maupun hukum perundang-undangan Indonesia diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang atau badan hukum (debitor) tidak mampu melunasi atau berhenti membayar utang-utangnya kepada (creditor pada saat utang-utang tersebut telah jatuh tempo yang ketetapannya (pailit) melalui putusan pengadilan yang benvenang baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan pihak kreditor.

Mengenai akibat kepailitan, ulama fikih (hukum ekonomi Islam) mengemukakan beberapa akibat hukum tentang dinyatakan seseorang jatuh bangkrut (pailit), diantaranya:

1. Sisa harta debitor pailit menjadi hak para kreditor. Oleh sebab itu, debitor pailit tidak dibenarkan bertindak secara hukum atas sisa hartanya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ  
أَفْلَسَ فَأَتَرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ (رواه البخاري ومسلم  
والترمذ و ابن ماجه)

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah saw bersabda :  
siappun yang bangkrut (pailit), lalu kreditnya mendapatkan barangnya sendiri pada si bangkrut (debitor) maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya itu dari pada yang lain<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Abu Daud Sulaiman, Ibnu al-Asyiasya, *Sunan Abu Daud*, Juz III, Maktabah al-Dahlan Indonesiyi, tt, hal.286.



2. Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh hakim boleh dikenakan tahanan sementara sampai utangnya dibayar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal pengawasan terus-menerus terhadap debitor pailit. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa para kreditor boleh mengawasi tindak tanduk debitor pailit secara terus menerus, hal ini didasarkan pada hadis rasulullah saw, yang mengatakan : "Orang yang memberi utang mempunyai hak untuk mengawasi orang yang berutang" (HR. Bukhari dan At-Tabrani). Namun demikian, debitor pailit tidak dilarang melakukan tindakan hukum, mencari rizki dan melakukan suatu perjalanan walaupun ia diawasi terus-menerus.

Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, apabila hakim berpendapat bahwa debitor pailit berada dalam kesulitan, maka para kreditor tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya secara terus menerus. Menurut debitor pailit seperti ini harus dibebaskan untuk mencari rizki sampai ia berkelapangan untuk membayar utangnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ

Artinya: Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah penangguhan sampai ia berkelapangan.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal.70.

Terhadap kebolehan menahan sementara atau memenjarakan debitor pailit, juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa hakim berhak untuk melakukan penahanan sementara atas debitor pailit ketika hakim belum mengetahui secara pasti keadaan keuangan debitor pailit. Menurut mereka dalam hal ini hakim boleh menahannya selama 2-3 bulan, dan jika dalam masa itu hakim mengetahui bahwa debitor pailit tidak memiliki harta untuk membayar utang-utangnya, maka ia dibebaskan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT Surah al-Baqarah (2) ayat 280, yang maksudnya : "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah penangguhan sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan (membebaskan) baik sebagian maupun semua harta itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Tentang hal ini ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang hakim boleh melakukan penahanan sementara terhadap debitor pailit apabila memenuhi empat syarat, yaitu :

- a. Waktu pembayaran utangnya telah jatuh tempo,
- b. Diketahui bahwa debitor pailit mampu membayar utangnya, tetapi enggan untuk membayarnya.
- c. Debitor pailit bukan ayah dan/atau ibu dari kreditor.
- d. Kreditor mengajukan tuntutan kepada hakim agar debitor pailit dikenakan penahanan sementara.

Ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa hakim boleh melakukan penahanan sementara terhadap debitor pailit dengan syarat :



- a. Keadaan keuangannya tidak diketahui secara pasti.
- b. Penampilan debitor pailit menyebabkan para kreditor curiga bahwa ia mempunyai harta, tetapi debitor tetap menyatakan tidak mempunyai uang.
- c. Debitor pailit merm'liki harta lain yang bisa membayar utangnya, tetapi enggan membayarnya.

Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa apabila debitor pailit mempunyai harta yang bisa dijual untuk membayar utangnya, maka hakim boleh memaksa orang itu untuk menjualnya, maka hakim boleh memaksa orang itu untuk menjualnya dan melunasi utangnya. Apabila ia enggan untuk menjualnya atau tidak mau membayar utangnya, sedangkan para kreditor menuntut kepada hakim untuk melakukan penahanan terhadap debitor pailit, maka hakim boleh melakukan penahanan sementara. Apabila dengan penahanan sementara ini hakim belum dapat memaksa debitor pailit untuk menjual hartanya untuk membayar utang, maka hakim boleh melakukan hukuman jasmani, seperti memukulnya sampai ia mau menjual hartanya dan membayar utangnya<sup>28</sup>

3. Apabila utang debitor pailit berupa barang, seperti hewan ternak, kendaraan, peralatan rumah tangga dan lain-lain, terhadap hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih :

---

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*, Ichtiar Bam Van Hoeven, Jakarta, 1996, hal. 1303.

Menurut ulama mazhab Hanafi, bahwa sekalipun barang-barang yang menjadi utang debitor pailit merupakan piutang salah seorang kreditor, kreditor itu tidak boleh mengambil kembali barang-barangnya. Artinya, bahwa barang itu meskipun masih utuh di rumah debitor pailit, seorang kreditor tidak boleh mengambilnya sendiri. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat yang mengatakan : "Barang siapa yang menemukan hartanya di tangan orang yang pailit, maka barang itu menjadi milik semua orang yang memberi utang." Maksudnya seluruh harta yang ada di tangan debitor pailit menjadi hak bersama para kreditor sekalipun salah seorang diantara para kreditor melihat harta yang diutangkannya kepada debitor pailit masih utuh.

Menurut jumhur ulama, apabila salah seorang kreditor melihat barangnya masih utuh di tangan debitor pailit, maka berhak mengambil kembali barang tersebut. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang mengatakan : "Siapa yang menemukan barangnya secara utuh di tangan orang pailit, maka ia lebih berhak atas barang itu dari orang yang memiutangi lainnya." Tetapi jumhur ulama, berbeda pendapat dalam syarat-syarat pengambilan barang dari tangan debitor pailit. Ulama mazhab Syafi'i mengemukakan syarat-syarat pengambilan itu, yakni:

- a. Waktu pembayaran utang telah jatuh tempo,
- b. Debitor pailit enggan membayar utangnya.
- c. Barang yang menjadi utang masih utuh di tangan debitor pailit.



Ulama mazhab Hambafi berpendapat, bahwa syarat-syarat pengambilan barang adalah:

- a. Barang masih utuh di tangan debitor pailit dan apabila berkurang atau rusak, tidak boleh diambil lagi.
- b. Tidak terjadi penambahan pada barang, misalnya kambing yang dahulu kecil sekarang sudah menjadi besar.
- c. Kreditor belum menerima harga barang sedikitpun.
- d. Terhadap barang tidak tersangkut hak orang lain, misalnya barang tidak dalam keadaan tergadai atau tidak dihibahkan kepada orang lain,
- e. Debitor pailit dan kreditor masih hidup.

Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, bahwa syarat-syarat pengambilan barang adalah :

- a. Barang masih utuh tanpa perubahan, penambahan dan pengurangan.
- b. Dapat diambil sebagai pembayar utang.
- c. Para kreditor lainnya tidak membayar ganti rugi kepada pemilik barang yang masih utuh, karena kalau para kreditor lainnya telah membayar ganti rugi kepada pemilik barang yang masih utuh di tangan debitor pailit, maka pemilik barang tidak boleh mengambil kembali barang itu.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 1364

Adapaun menurut sistem hukum perundang-undangan Indonesia secara umum akibat hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 Undang-undang Kepailitan, bahwa harta pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.<sup>30</sup>
3. Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 Ayat (1)).
4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25).
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor, debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.<sup>31</sup>
6. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26).

---

<sup>30</sup> Imran Nating, *Peranan Tanggung Jawab kurator dalam pengumsan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.40.

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdenini, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 256.



7. Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit [Pasal 26 Ayat (2)].
8. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang diajukan terhadap debitor pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27).
9. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Ayat (1), setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi hanya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
10. Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut haknya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 56 Ayat (1)).

Kepailitan mempunyai akibat-akibat penting terutama bagi debitor. Sejak diucapkan kepailitan oleh hakim, maka putusan tersebut membawa akibat hukum, baik terhadap diri debitor pailit, harta kekayaan, pihak ketiga maupun terhadap harta perkawinan. Mengenai debitor pailit sebagaimana dinyatakan dalam pasal 24 Undang-undang

Kepailitan, bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>32</sup>

Pernyataan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*), tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Dengan demikian, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya menikah atau membuat perjanjian kawin, menerima hibah, bertindak menjadi kuasa atau mewakili pihak lain, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap harta kekayaan debitor. Debitor tidaklah berada dibawah pengampuan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan harta bendanya berada pada kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.

Walaupun secara teoritis kepailitan tidak mempengaruhi kedudukan debitor pailit, akan tetapi dalam bermasyarakat (berniaga) putusan pailit

---

<sup>32</sup> Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004, *Op.cit*, hal.16.

<sup>33</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Op.cit*, hal.257.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Kepailitan Menurut Sistem Hukum Ekonomi Islam dan Sistem Hukum Perundang-undangan Indonesia

##### 1. Menurut Sistem Hukum Ekonomi Islam

###### a. Definisi Kepailitan

Menurut bahasa fikih, kata yang digunakan untuk pailit adalah *iflas*, yang berarti tidak memiliki harta atau uang, sedangkan orang yang pailit disebut *muflis* dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang jatuh bangkrut (pailit) disebut *taqlis*.<sup>1</sup> Jadi menurut bahasa, pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami jatuh miskin (bangkrut) dan tidak mempunyai harta (uang).

Menurut syara kata pailit mengandung dua pengertian, yaitu :

- 1) Apabila hutang itu menghabiskan harta orang yang berhutang (debitor), sehingga harta itu tidak cukup lagi untuk melunasi hutang.
- 2) Apabila seseorang itu sama sekali tidak mempunyai harta yang konkrit.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 1996, hal.1361.

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid 4, Alih Bahasa Imam Ghazali Said dan A. Zaidum, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hal.385.

Hamzah Ya'qub dalam bukunya *fiqh Mu'amalah*, kode etik dagang menurut Islam mengemukakan bahwa pailit adalah seseorang yang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar utang-utangnya dan dinyatakan pailit oleh hakim.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa kepailitan menurut hukum ekonomi Islam adalah suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum yang berutang sampai pada suatu kondisi tertentu tidak mampu lagi membayar utangnya kepada pemberi utang (kreditor) dan dinyatakan bangkrut (pailit) oleh hakim (pengadilan).

Untuk lebih jelasnya dalam memahami kepailitan maka ada baiknya penulis kemukakan tentang *gharimun* yaitu orang-orang yang berutang (debitor), guna mengarahkan pembahasan tesis ini dan mengetahui sebab-sebab terjadinya kepailitan. Orang yang jatuh bangkrut (*muflis*) diidentikkan dengan *gharim*, yaitu orang yang berutang (debitor), karena biasanya orang yang mengalami jatuh bangkrut adalah orang yang berutang (debitor).

Ulama fikih memberikan definisi *gharim* sebagai berikut:

- 1) Yusuf Al-Qordowi menyebutkan bahwa Ibnu Human dalam al-Fath menerangkan, *gharim* adalah orang yang mempunyai piutang dari orang lain tetapi tidak sanggup mengambilnya, sedangkan ia tidak memiliki nisab.

---

<sup>3</sup> Hamzah Ya'qub, *Fiqh Mu'amalah Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1992, hal.238.



- 2) Imam al-Tabari meriwayatkan dari Abu Ja'far dan Qatadah bahwa *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dengan tidak berlebihan sehingga imam wajib membayar dengan *baitul maal*.
- 3) Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan tidak mempunyai bagian yang lebih dari utangnya.

*Tqflis* dalam bidang putusan hakim (pengadilan) adalah ucapan hakim kepada orang yang berhutang agar tidak membelanjakan hartanya.

Ulama fikih sepakat mendefinisikan *taflis* dengan rumusan "keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak secara hukum atas hartanya karena ia terbelit utang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya." Apabila seorang pedagang (debitor) meminjam modal dari orang lain (kreditor) dan ternyata usaha perdagangannya tidak lancar, sehingga seluruh dagangannya habis, maka atas permintaan kreditor kepada hakim, debitor dapat dinyatakan pailit, sehingga segala tindakan hukumnya terhadap sisa harta miliknya bisa dicegah. Pencegahan tindakan hukum debitor pailit ini bertujuan untuk menjamin utangnya kepada kreditor.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menyelesaikan perkara *taflis*, yakni menahan harta seorang debitor untuk dibagi-bagikan kepada kreditor. Ringkas dari riwayat itu adalah sebagai berikut : Usaifi dari warga Juhainah mempunyai utang, tetapi ia tidak mau membayarnya, Maka Umar bin Khattab menahan hartanya dan

memberitahukan kepada siapa saja yang mempunyai piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagikan harta (membayar utang). Dengan demikian dapat dipahami bahwa *taflis* dalam putusan hakim (pengadilan) adalah adanya wewenang penguasa atau hakim dalam mengambil suatu keputusan terhadap debitor yang telah jatuh bangkrut.<sup>4</sup>

- 4) Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mendefinisikan *gharim* adalah orang yang berutang terbagi pada dua golongan dan mempunyai hukum tersendiri.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dalam istilah fikih tentang tata cara atau pengaturan kepailitan disebut dengan istilah *hijr*, yaitu secara bahasa berarti menyempitkan dan menghalangi, sedangkan menurut syara' *hijr* berarti melarang manusia bertindak untuk menggunakan harta.<sup>6</sup> Adapun *hijr* menurut istilah adalah mencegah membelanjakan harta, baik mencegah demi kemaslahatan orang yang dicegah maupun mencegah demi kemaslahatan orang lain<sup>7</sup>. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *hijr* adalah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan (memperedarkan) hartanya.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hat. 239.

<sup>5</sup> Yusuf al-Qordowi, *Hukum Zakat*, Gema Insani Perss dan Mizan, Jakarta, 1998, hal 594-595.

<sup>6</sup> Kahar Mansyur, *Fiqih Sunah Pengadilan/Waris*, jilid 14, Kalam Mulia, Jakarta, 1991, hal 253.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih islam*, al-Tahiriyah, Jakarta, 1976, hal 301. 59



Sedangkan pihak yang berhak melarang atau mencegah adalah wali nasab atau hakim, yang mana tujuan dari larangan ini adalah :

1) Dilakukan larangan terhadap seseorang guna menjaga hak orang lain.

Seperti larangan terhadap:

- a) Orang yang berutang, sedang utangnya tunai dan lebih banyak dari hartanya. Ini dilarang berbelanja guna menjaga yang berpiutang.
- b) Orang sakit payah dilarang membelanjakan dari  $\frac{1}{3}$  hartanya guna menjaga hak warisnya.
- c) Yang menggadaikan dilarang membelanjakan barang yang sedang digadaikan.
- d) Orang murtad (orang yang keluar dari Islam) dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak orang Islam.

2) Dilarang karena menjaga haknya sendiri, seperti:

- a) Anak kecil hendaknya dijaga, tidak boleh membelanjakan hartanya sehingga sampai cukup umur (*baligh*) dan sudah cakap/pandai berbelanja.
- b) Orang gila dilarang berbelanja sampai ia sembuh.
- c) Orang yang menyia-nyiakan hartanya (pemboros) dilarang berbelanja sampai ia sadar<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jilid 2, Kalam Mulia, Jakarta, 1995, hal 372.

Hadis Nabi saw menjelaskan :

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى م: حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ

وَبَاعَهُ فِي دِينٍ كَانَ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Nabi Besar saw, telah menahan harta Muaz dan beliau jual harta itu untuk membayar utangnya<sup>11</sup>.

Dengan demikian bahwa *taflis* dalam bidang putusan hakim (pengadilan) itu merupakan perbuatan dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan seseorang atau badan hukum di muka pengadilan, dan hakim berhak melarang seseorang yang pailit berbelanja (*bertasarruf*) dengan hartanya. Apabila dilanggar, maka mereka (debitor atau kreditor) akan mendapat sangsi penjara.

### b. Syarat Kepailitan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kepailitan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum mengalami jatuh bangkrut dari usahanya dan tidak sanggup lagi melunasi utang-utangnya, sehingga dinyatakan pailit oleh hakim.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa seseorang atau badan hukum (debitor) pailit disebabkan banyak mempunyai utang pada orang lain

<sup>11</sup> " Muhammad bin al-Syaukani, *Naylul Author*, Juz V, Mustafa Babil Halbi, Mesir, tt, hal.275.



untuk mendapatkan pertolongan yang mereka terima dengan cara berutang atau meminjam pada orang lain.

- c. Orang yang jatuh bangkrut (*muflis*) tersebut sakit parah dan meninggal dunia dengan meninggalkan utang, sementara harta *muflis* tidak mencukupi untuk membayar utang, begitu juga ahli warisnya tidak mampu untuk membayar utang.<sup>14</sup>

## 2. Menurut Hukum Perundang-Undangan Indonesia

### a. Definisi Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Apabila ditelusuri lebih mendasar, istilah pailit dapat dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda kata pailit berasal dan istilah *failliet* yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat.<sup>15</sup> Dalam bahasa Perancis pailit berasal dan kata *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dinamakan *lefaile*, yakni merupakan kata kerja *failir* yang berarti gagal. Adapun dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *iofail* dengan arti yang sama dalam bahasa *lainfaillure*, yang berarti gagal atau kegagalan. Di negara-negara yang berbahasa inggris,

<sup>14</sup> Hamzah Ya'qub, *Op.cit*, hal.212 64

<sup>15</sup> Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rienika Cipta, Jakarta, 1994, hal. 18.

pengertian pailit dan kepailitan digunakan dengan kata-kata "*bankrupt*" dan *bankruptcy*".<sup>16</sup>

R. Sukardono dalam bukunya Hukum Dagang mengatakan bahwa kepailitan adalah penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga balai harta peninggalan yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan budel dari orang yang pailit.<sup>17</sup>

Adapun menurut Kartono dalam bukunya Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi seluruh kekayaan debitor pailit lantaran mempunyai utang kepada para kreditor.<sup>18</sup>

Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran secara berpiutang secara adil.<sup>19</sup> menurut Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto bahwa kepailitan adalah suatu beslah ezeutorial yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang milik debitor pailit.<sup>20</sup>

Sementara menurut rumusan Pasal 1 Ayat ( 1 ) Undang – Undang Kepailitan dapat diketahui bahwa pailit adalah suatu keadaan debitor

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>17</sup> R. Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia Kapita Selekt*a, Rajawali Press, Jakarta, hal. 7.

<sup>18</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 17

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 1980, hal.224.

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal.12.



tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya dan itu pun harus dinyatakan dengan putusan pengadilan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kepailitan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dapat ditagih dan dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian atau pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah suatu keadaan dimana seorang atau badan hukum (debitor) tidak mampu melunasi atau membayar utang-utangnya kepada kreditor pada saat utang-utang tersebut telah jatuh tempo yang ketetapannya (pailit) melalui putusan pengadilan yang berwenang baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan pihak kreditor.

#### **b. Syarat Kepailitan**

Sangatlah penting diketahui mengenai apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Syarat-syarat tersebut perlu diketahui, karena apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonannya tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Berkenaan dengan hal tersebut,

---

<sup>21</sup> Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1984, hal.187.

pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."<sup>22</sup>

Berdasarkan pasal 2 Ayat (1) ini, maka agar seorang atau badan hukum (debitor) dapat dinyatakan pailit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Debitor mempunyai dua orang atau lebih kreditor.

Menurut fasal 1 Undang-undang Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitor harus mempunyai lebih dari seorang kreditor ini selaras dengan ketentuan pasal 1132 KUHPerdara yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pan passu pro rata parte*. Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang harus ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan. Sebab apabila debitor yang hanya

---

<sup>22</sup> Undang-undng Nomor 37 Tahun 2004, *Op.cit*, hal.5.



memiliki seorang kreditor saja dapat dilakukan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor, karena dengan demikian pastilah bahwa seluruh hasil penjualan harta kekayaan itu merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu. Sehingga tidak akan ada kekhawatiran terjadi perebutan terhadap harta kekayaan debitor, karena hanya ada satu orang kreditor saja. Dengan demikian apabila debitor hanya mempunyai seorang kreditor saja, maka tidak dapat menggunakan ketentuan kepailitan.

## 2) Harus ada utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit adalah harus adanya utang. Undang-undang Kepailitan tidak menentukan apa yang dimaksudkan dengan utang. Dengan demikian para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pernyataan pailit dapat berselisih pendapat mengenai ada atau tidak adanya utang. Pihak-pihak dimaksud adalah penasehat hukum dari pemohon, penasehat hukum dari debitor dan majelis hakim yang memeriksa permohonan itu, baik majelis hakim pengadilan niaga, majelis hakim kasasi, maupun majelis hakim peninjau kembali.

### 3) Utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata "dan" diantara kata "jatuh waktu" dan "dapat ditagih."

Menurut hemat penulis, kedua istilah tersebut berbeda pengertiannya dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Pada perjanjian-perjanjian perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu adalah utang yang dengan lampainya waktu penjadwalan yang ditentukan didalam perjanjian kredit itu menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk mengagihnya. Dalam dunia perbankan dikenal bahwa utang tersebut telah *expired*. Tidak hanya suatu kredit bank dinyatakan *expired* pada tanggal akhir perjanjian kredit selesai, cukup apabila tanggal-tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai. Namun dapat terjadi bahwa walaupun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena telah terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*, maka boleh dalam perjanjian kredit perbankan untuk mencantumkan klausul yang disebut *events of default clause*, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah *debtor in-default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi. Terjadinya peristiwa (*event*) itu bukan saja mengakibatkan nasabah debitor cidera janji, tetapi



## B. Penyelesaian Kepailitan dan Akibat Hukumnya

### 1. Menurut Hukum Ekonomi Islam

#### a. Subjek Hukum Kepailitan

Tentang pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit sebagaimana tersirat dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan, diantaranya :

##### 1) Orang perorangan

Maksud orang perorangan di sini adalah baik laki - laki maupun perempuan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Apabila ternyata terbukti mengalami kegagalan atau kebangkrutan (pailit) dalam usahanya, maka atas permintaan kreditor kepada hakim, orang tersebut dapat dinyatakan pailit<sup>25</sup> Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara istri tersebut tidak ada pencampuran harta.<sup>26</sup>

##### 2) Badan hukum

Maksud badan hukum di sini adalah bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia sebagai orang perorangan. Akan tetapi perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi dan lain-lain. Pada badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah

<sup>25</sup> Abdul Azis Dahlan, *Op.cit.* hal. 1361.

<sup>26</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Kepailitan* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 16.

perbuatan badan hukum itu sendiri. Organ itu hanya dapat mengikat badan hukum, jika tindakan-tindakannya didalam batas wewenangnya yang ditentukan dalam anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lainnya dan hakikat dari tujuannya itu.

### 3) Harta warisan

Harta warisan seseorang yang meninggal dunia sebelum dibagikan kepada para ahli warisnya, dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia semasa hidupnya meninggalkan utang atau berada dalam keadaan berhenti membayar utang.

### 4) Penjamin atau hawalah

Maksud penjamin ini adalah penanggungan utang, yakni suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw, yang artinya : Dari Jabir r.a. ia berkata : "Telah wafat seorang diantara kami, lalu kami memandikannya dan mengkafaninya, kemudian kami bawa ke hadapan Rasulullahsaw, lalu kami bertanya : Apakah engkau akan menshalatnya? Maka beliau melangkah maju dan bertanya : Apakah ia berutang? Kami menjawab : Dua dinar, kemudian beliau berpaling, maka Abu Qatadah datang kepadanya, seraya berkata : Dua dinar itu tanggungan saya, maka bersabda Rasulullah saw : Benar-benar engkau telah menanggungnya



sehingga terlepas si mayit daripadanya. Ia berkata : ya, maka beliaupun bersembahyang atasnya (HR.Abu Dawud dan Nasa'i).<sup>27</sup>

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit adalah :

1) Muflis (debitor)

Maksud muflis di sini adalah orang yang jatuh bangkrut (pailit). Dalam hal ini apabila seorang debitor mengalami jatuh bangkrut terhadap usahanya, maka atas permintaan debitor kepada hakim, debitor dapat dinyatakan pailit, sehingga segala tindakan hukumnya terhadap sisa harta miliknya dapat dicegah. Pencegahan tindakan hukum debitor pailit ini bertujuan untuk menjamin kepentingan utangnya kepada kreditor.<sup>28</sup>

2) Kreditor

Seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat mengajukan permohonan pailit selama telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, sehingga atas permintaan kreditor kepada Hakim, seorang debitor dapat dinyatakan pailit.

3) Kejaksaan

Apabila permohonan pernyataan kepailitan yang mengandung unsur-unsur alasan untuk kepentingan umum tidak dipenuhi oleh kejaksaan, maka permohonan pernyataan pailit tersebut harus ditolak. Sebab selain harus memenuhi alasan untuk kepentingan umum, juga harus

<sup>27</sup> Moh. Irfan, *Fiqih Islam Lengkap*, Toha Putra, Semarang, 1978, hal.417.

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan, *Op.cit.* hal. 1361.

memenuhi unsur-unsur : debitor memiliki dua atau lebih kreditor, tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan kepentingan umum antara lain :

- a) debitor melarikan diri
- b) debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan
- c) debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan hukum usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
- d) debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian utang piutang yang telah jatuh waktu.<sup>29</sup>

## b. Objek Hukum Kepailitan

Harta yang dapat ditagih oleh kreditor dari orang yang jatuh bangkrut (pailit) tergantung pada macam dan kadar barangnya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ  
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعِيْنَهُ عِنْدَ رَجُلٍ  
 أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَقْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (رواه مسلم)

<sup>29</sup> Imran Nating, *Peranan Tanggung Jawab kurator dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.38.



Hadis ini menjelaskan bahwa tentang barang yang dipertukarkan dalam jual beli

dan utang-piutang, maka kreditor atau pihak berpiutang berhak menuntut dari orang yang mengalami jatuh bangkrut (debitor), piutangnya menjadi tanggung jawab orang yang pailit (debitor).

Ulama fikih sepakat bahwa barang-barang yang terkena pailit meliputi semua barang yang berharga, seperti hewan ternak, kendaraan, emas, uang perak, surat-surat berharga dan lain-lain, kecuali sesuatu yang sangat dibutuhkan berupa rumah, pakaian, makanan dan lain-lain<sup>32</sup>. Dengan demikian bahwa barang-barang yang terkena pailit adalah barang-barang sekunder yang memiliki nilai tinggi dan bukan barang-barang primer (kebutuhan pokok) yang sangat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup manusia.

### c. Peristiwa Hukum Kepailitan

Menurut ulama fikih, seorang debitor, atas pengaduan kreditor dapat diajukan sebagai tergugat ke pihak pengadilan, sehingga ia dinyatakan pailit. Sebuah riwayat menyatakan bahwa Rasulullah saw menetapkan Muaz bin Jabal sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya. Kemudian Rasulullah saw melunasi utang Muaz bin Jabal dengan sisa hartanya. Akan tetapi karena yang berpiutang

---

<sup>32</sup> Kahar Mansyur, *Op.cit*, hal.263.

Artinya: Amma ba'du, wahai sekalian manusia, sesungguhnya usai adalah Usaifi dari Juhainah. Ia telah merelakan agama dan kejujurannya untuk dikatakan bahwa ia telah mendahulukan semua kebutuhan dan telah berutang tnpa mau melunasi sehingga menjadi dua periuk atasnya. Maka barang siapa mempunyai piutang atasnya, hendaklah mereka datang kepada kami.<sup>47</sup>

## **2. Menurut Sistem Hukum Perundang-undangan Indonesia**

### **a. Subjek Hukum Kepailitan**

Tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang Kepailitan yang berbunyi:

- (1) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya boleh diajukan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>47</sup>Ibnu Rusyid, *Op.cit*, hal.387. 85



- (4) Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal debitor perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan umum, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>48</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Kepailitan tersebut, dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah :

- 1) Debitor sendiri yang mempunyai dua atau lebih kreditor.
- 2) Pihak kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum.
- 3) Bank Indonesia, apabila menyangkut debitor yang merupakan bank.
- 4) Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, bursa efek. lembaga kliring dan penjaminan maupun lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- 5) Menteri keuangan, apabila menyangkut debitor yang merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun maupun badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan umum.

---

<sup>48</sup> Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.5.

Adapun pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah "debitor," yang meliputi:

1) Orang perseorangan

Orang perseorangan yang dimaksud bisa laki-laki atau perempuan, baik yang belum menikah atau sudah menikah. Pasal 4 Undang-undang Kepailitan menentukan, apabila permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor yang sudah menikah, permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami/istri, kecuali tidak ada percampuran harta kekayaan (harta bersama). Sepanjang suami/istri dinyatakan pailit, maka harta kekayaan yang dimaksud akan menjadi harta kepailitan. Sebaliknya apabila dari awal sudah diadakan pemisahan harta kekayaan, maka harta yang dimaksud dapat dikecualikan menjadi harta kepailitan.

2) Badan hukum

Dalam hal ini badan hukum juga dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pernyataan pailit tersebut mengakibatkan pengurusan harta kekayaan badan hukum dan beralih kepada kurator. Kurator inilah yang bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dengan sendirinya setiap gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal Undang-undang Kepailitan, bahwa dalam kepailitan suatu perseroan terbatas, suatu perseroan pertanggungan bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi atau lain perkumpulan yang berbadan



hukum, ataupun suatu yayasan, segala kewajiban yang dibebankan kepada debitor pailit dipertanggungjawabkan kepada pengurus atau organisasi perseroan atau perkumpulan tersebut.

### 3) Persekutuan-persekutuan yang tidak berbadan hukum

Pasal 5 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 18 KUHD yang menyatakan dalam persekutuan firma adalah tiap-tiap persero secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan.<sup>49</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila suatu persekutuan firma dinyatakan pailit oleh pengadilan, semua persero firma harus bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan persekutuan firma. Begitu juga dalam persekutuan komanditer, sekutu komplementerlah yang bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dilakukan persekutuan komanditer. Sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanamkan, kecuali apabila sekutu komanditer juga ikut serta mengurus persekutuan komanditer. Dalam hal tersebut ia bersama-sama dengan sekutu komplementer harus bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap persekutuan komanditer.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Nanik Suparni, *KUHD dan Kepailitan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.

<sup>50</sup> Rahmadi usman, *Op.cit*, hal. 30.

mendasarkan pembatalan pembebasan utang yang menghalangi *trustee* dalam mengumpulkan dan mendistribusikan harta pailit.<sup>124</sup>

Walaupun secara tertulis Undang-Undang Kepailitan tetap memihak kreditor, namun pada pertengahan abad ke-18 terdapat beberapa perubahan sikap dan pandangan yang mengarah pada perlindungan terhadap kepentingan debitor. Hal ini sejalan dengan dunia perkreditan dan perdagangan yang mengalami perubahan sebagaimana *the Industrial Revolution* berubah,<sup>125</sup> Namun demikian praktik pembebasan utang debitor masih sulit diterapkan. Pada 1706, persetujuan kreditor merupakan prasyarat tambahan atas pemberian pembebasan utang.<sup>126</sup> Praktiknya, hal ini sulit dilakukan, karena persetujuan dari kreditor sulit diperoleh.<sup>127</sup>

#### **D. Analisis Perbandingan Tentang Kepailitan Menurut Sistem Hukum Ekonomi Islam dan Sistem Hukum Perundang-undangan Indonesia**

##### **1. Konsep Kepailitan Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perundang - Undangan Indonesia**

Menurut hukum ekonomi Islam bahwa istilah pailit sama pengertiannya dengan taflis, yaitu keputusan hakim yang melarang

<sup>124</sup> 11 U.S.C. §727(a)(1988).

<sup>125</sup> Robert Weisberg, "Commercial Morality, die Merchant Character, and the History of die Voidable Prefernce," 39 *Stan. L. Rev.* 3(1986), hal. 32. "Pahamdalam perdagangan yang digunakan dalam abad ke-18...merubah secara moral fenomena perdagangan dan kredit yang sukar dipahami dan diragukan menjadi sesuatu yang dibutuhkan, dan kemudian menjadi sesautu yang baik."

<sup>126</sup> Charles J. Tabb, "The History of the Bankruptcy Discharge, *loc. Cit*

<sup>127</sup> Bruce P. Smith "Review Essay" 25 *Law & Hits Reev.* 593 (2007) iial 606



seseorang bertindak secara hukum atas hartanya karena terbelit utang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Apabila seorang debitor meminjam modal dari orang lain (kreditor), dan ternyata usaha perdagangannya tidak lancar, sehingga seluruh dagangannya habis, maka atas permintaan kreditor kepada hakim, debitor dapat dinyatakan pailit, sehingga segala tindakan hukumnya terhadap sisa harta miliknya dapat dicegah, sepanjang pencegahan tindakan hukum debitor pailit ini bertujuan untuk menjamin utangnya kepada kreditor dan demi kebaikan bersama.

Dengan demikian seorang hakim mempunyai kewenangan atau kesempatan untuk menemukan hukum yang tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan demi kemaslahatan bersama.

Adapun menurut sistem hukum perundang-undangan (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) bahwa istilah pailit berarti bangkrut atau jatuh miskin, dimana mengacu pada keadaan debitor (bisa orang perorangan, badan hukum, maupun perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan bahwa debitor telah berhenti membayar utangnya (tidak mampu melunasi utang) yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitor tidak berhak lagi mengurus harta bendanya.

Namun walaupun demikian secara garis besar pengertian kepailitan baik menurut sistem hukum ekonomi Islam maupun perundang-undangan (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) substansinya adalah sama, yaitu

suatu keadaan dimana debitor mengalami jatuh bangkrut dalam usahanya, sehingga tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor.

Selanjutnya mengenai syarat utama seseorang debitor dapat dinyatakan pailit menurut sistem hukum perundang-undangan (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) adalah apabila seorang debitor pailit mempunyai paling sedikit dua kreditor dan tidak membayar lunas utangnya yang sudah jatuh tempo. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi : "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya". Sedangkan menurut sistem hukum ekonomi Islam bahwa syarat seseorang debitor dapat dinyatakan pailit adalah tidak harus mempunyai dua atau lebih kreditor, tetapi seorang kreditor pun sudah bisa dinyatakan pailit. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw menetapkan Muaz bin Jabal sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya. Kemudian Rasulullah saw melunasi utang Muaz bin Jabal dengan sisa hartanya. Tetapi karena yang berpiutang 100 (kreditor) merasa tidak menerima piutangnya sepenuhnya, ia melakukan protes kepada Rasulullah saw, lalu oleh Rasulullah saw dijawab tidak ada yang bisa diberikan kepada kamu selain itu (HR. ad-Daruqutni dan al-Hakim).



Mengenai pembayaran utang, menurut sistem hukum perundang-undangan (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) seorang debitor harus melunasi utangnya setelah jatuh tempo secara tepat waktu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1), kecuali apabila terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak (debitor dan kreditor) untuk mengadakan penangguhan atau perpanjangan waktu, itu pun harus mengajukan permohonan kepada pengadilan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 222 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang sebagai berikut :

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai kelebihan dari satu kreditor atau oleh kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.



Berdasarkan pasal 222 ini, permohonan penundaan pembayaran utang harus diajukan kepada pengadilan dengan ditandatangani pemohon dan oleh advokatnya. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah pituang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Sedangkan menurut sistem hukum ekonomi Islam bahwa orang yang berutang (debitor) dalam keadaan kesukaran agar diberikan penangguhan atau perpanjangan untuk membayarnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280, yang artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah penangguhan sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua harta) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Tentang hal pengawasan, menurut sistem hukum perundang-undangan (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) bahwa seorang debitor yang dinyatakan pailit harus diawasi terus menerus, baik oleh kurator, panitia kreditor, maupun oleh hakim pengawas. Sedangkan menurut sistem hukum ekonomi Islam bahwa debitor meskipun sudah dinyatakan pailit tidak perlu diawasi secara terus menerus, melainkan debitor pailit seperti ini harus dibebaskan untuk mencari rezeki sampai ia berkelapangan untuk melunasi atau membayar utangnya.

Mengenai status hukum bagi debitor pailit, baik menurut sistem hukum perundang-undangan (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004)



maupun sistem hukum Islam menegaskan bahwa debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan (hakim), dianggap sebagai orang yang berada di bawah pengampuan dan dianggap tidak cakap bertindak hukum secara hukum terhadap seluruh hartanya. Dengan demikian segala tindakan hukum yang menyangkut harta bendanya dinyatakan tidak sah, hartanya menjadi hak para kreditor, dan sebaiknya kepailitannya diumumkan agar khalayak ramai mengetahui keadaannya dan lebih berhati-hati, sehingga tidak melakukan transaksi ekonomi dengannya. Hal ini sebagaimana pendapat jumbuh ulama (ulama fikih), bahwa orang (debitor) yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, segala tindakannya yang menyangkut dengan harta bendanya dianggap tidak sah demi hukum dengan tujuan untuk memelihara dan menjamin hak-hak kreditor, sebab apabila tindakan hukumnya terhadap hartanya tidak dibatasi, maka debitor pailit ini akan lalai membayar utangnya, yang pada akhirnya membuat perselisihan semakin kuat antara para kreditor dan debitor pailit.

Tentang barang-barang yang terkena pailit, menurut sistem hukum perundang-undangan (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) adalah semua barang-barang kekayaan debitor pailit dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, baik berupa barang-barang yang bergerak seperti perhiasan, kendaraan dan lain-lain maupun barang-barang yang tidak bergerak (tetap) seperti tanah, baik barang-barang yang berwujud maupun barang-barang yang tidak berwujud seperti piutang atau tagihan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 21 Undang-undang

Kepailitan maupun pasal 1131 KUHPerdara, kecuali barang-barang yang tidak terjangkau atau tidak terkena pailit seperti alat-alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari, persediaan makanan untuk satu bulan, buku kerja, uang sebagai nafkah keluarga dan ekonomi Islam bahwa barang-barang yang terkena pailit adalah barang-barang sekunder yang memiliki nilai tinggi seperti kendaraan, emas, perak, uang, surat-surat berharga dan lain-lain, bukan barang-barang primer (kebutuhan pokok) yang sangat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup manusia, seperti sandang, papan dan pangan.

## **2. Penyelesaian Kepailitan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perundang-undangan Indonesia**

Untuk memudahkan cara kerja hakim dalam menyelesaikan masalah kepailitan, maka hakim dapat menggunakan rumusan, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya. Dalam peraturan kepailitan bahwa penyelesaian kepailitan merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan oleh seorang hakim dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan seorang atau badan hukum yang jatuh bangkrut dalam usahanya, dimana ketentuan keadaan berhenti membayar dalam peraturan kepailitan serta aturan hukumnya belum ada kejelasan dalam peraturan kepailitan itu, sehingga dapat dinyatakan pailit. Karena penyelesaian masalah kepailitan sudah merupakan wewenang dari hakim,



maka hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak mengaturnya dan hakim tersebut dapat dituntut karena penolakan itu.

Penyelesaian kepailitan menurut sistem hukum perundang-undangan (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) harus mengacu pada cara kerja hakim, dimana hakim harus menggunakan dalil-dalil yang didasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang ada, diantaranya :

1. Termohon selalu hadir dalam persidangan.
2. Masih ada kesanggupan dari pihak debitor untuk membayar utang.
3. Ada bukti, saksi dan persangkaan dalam masalah ini.
4. Hasil pemeriksaan di persidangan tidak ada utang lain.
5. Permohonan diajukan oleh para pemohon baik tingkat pertama atau banding dan kasasi.
6. Adanya pengakuan dari termohon.

Selain berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, juga dapat dilihat dalam pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (5) Undang-undang Kepailitan sebagai berikut : Pasal 2 Ayat (1) menyatakan. harus adanya bukti dan fakta keadaan yang menunjukkan termohon (debitor) berada dalam keadaan berhenti membayar. Dan istilah berhenti membayar ini tidak harus diartikan *near da letter*, yang artinya yang bersangkutan berhenti sama sekali tidak membayar, melainkan yang bersangkutan pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan berhenti membayar.

Pasal 6 Ayat (5) menegaskan pemyataan tentang keadaan berhenti membayar, sehingga hakim tidak terikat pada ketentuan pasal 164.

Reglement Indonesia yang diperbaharui tentang alat bukti seperti surat berharga, saksi, persangkaan dan pengakuan, sehingga putusan tidak dalam keadaan berhenti membayar merupakan suatu kenyataan sepenuhnya oleh hakim untuk menilainya. Hakim harus menyesuaikan dalil (cara kerja) yang digunakan dengan masalah-masalah yang ditangani.

Adapun akibat hukum dari kepailitan bisa terhadap diri debitor pailit, harta kekayaan, pihak ketiga maupun terhadap harta perkawinan.

Terhadap diri debitor pailit, pasal 24 Undang-undang Kepailitan menegaskan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian debitor pailit hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja, tetapi debitor pailit tetap dapat melakukan perbuatan hukum, seperti menikah, menerima hibah, bertindak menjadi kuasa dan lain-lain.

Terhadap harta kekayaan, Pasal 21 Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa harta pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitor dan segala apa yang diperoleh selama kepailitan, baik harta kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, kecuali tidak berlaku terhadap harta yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia.

Terhadap pihak ketiga, setelah pengadilan menjatuhkan hukuman putusan kepailitan, maka debitor pailit tidak lagi bebas menguasai dan mengurus harta kekayaannya, akan tetapi dalam batas-batas tertentu ia masih mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum selama



perbuatan hukum tersebut tidak menjadi tanggung jawab budel. Apabila perbuatan itu merugikan budel pailit, balai harta peninggalan (pihak ketiga) dapat mengemukakan pembatalan berdasarkan asas *action paulina*. Oleh karena itu, segala perbuatan debitor pada pihak ketiga sebelum putusan kepailitan dapat bertindak sebagai pihak penagih pesaing, kecuali perbuatan itu dilakukan setelah empat puluh hari sebelum putusan kepailitan.

Terhadap harta perkawinan, apabila seseorang yang kawin dalam satu kebersamaan harta pailit, maka pailit itu diberlakukan sebagai kepailitan bersama. Dengan demikian apabila seseorang pailit yang kawin dalam suatu kebersamaan mempunyai barang-barang pribadi, maka barang-barang itu tidak bertanggung jawab atas tagihan terhadap harta kebersamaan melainkan hanya diperuntukkan bagi utang yang mengikat debitor pailit secara pribadi.

Sedangkan penyelesaian kepailitan menurut sistem hukum ekonomi Islam lebih mengacu pada praktek yurisprudensi, sehingga yurisprudensi sering dijadikan pegangan atau hukum pertimbangan untuk menyelesaikan perkara oleh hakim. Dengan demikian dalam kasus debitor tidak mampu lagi membayar utangnya karena hartanya tidak ada lagi atau hartanya tidak cukup untuk membayar seluruh utang (kepailitan), maka ulama fikih sepakat membolehkan hakim melakukan intervensi untuk menyelesaikan utang. Salah satu pertimbangannya adalah banyaknya pihak kreditor yang mengajukan tuntutan kepada hakim. Dalam suatu penyelesaian perkara hakim wajib menetapkan

membagikannya kepada para kreditor dimana pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan oleh wakil dari para kreditor maupun negara.

Mengenai berakhirnya status pailit debitor karena adanya perdamaian antara kreditor dan debitor dapat ditemukan dalam hukum ekonomi Islam maupun hukum perundang-undangan Indonesia. Dalam hukum ekonomi Islam, perdamaian dapat diartikan sebagai penangguhan atau penundaan kewajiban membayar sebagian hak kreditor berdasarkan kesepakatan tuntuk mengakhiri sengketa antara debitor dan kreditor. Sedangkan menurut hukum perundang-undangan Indonesia bahwa kesepakatan perdamaian merupakan pelaporan organisasi modern, dimana konsepnya adalah penawaran pembayaran sebagian utang-utang debitor hingga lunas yang selanjutnya membebaskan utangnya.

Adapun mengenai pembebasan utang debitor atas dasar keikhlasan kreditor menurut hukum ekonomi Islam dan hukum perundang-undangan Indonesia secara umum terdapat pandangan yang sama, yaitu pembebasan utang diberikan atas perintah pengadilan dimana syarat pembebasan utang adalah debitor tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau perbuatan tidak patut lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan atau debitor mempunyai itikad baik atau mau bekerjasama dalam proses kepailitan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat ikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum perundang-undangan Indonesia bahwa syarat seseorang dapat dinyatakan pailit apabila mempunyai paling sedikit dua kreditor dan tidak membayar lunas utangnya yang sudah jatuh tempo, sedangkan menurut hukum ekonomi Islam bahwa syarat seorang debitor dinyatakan pailit tidak harus mempunyai dua atau lebih kreditor, tetapi seorang kreditor pun sudah bisa dinyatakan pailit.
2. Menurut hukum perundang-undangan Indonesia dan hukum ekonomi Islam bahwa pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah orang perorangan, badan hukum dan penjamin (*hawatah*), adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit adalah debitor (*mufiis*) kreditor dan kejaksaan.
3. Menurut hukum perundang-undangan Indonesia dan hukum ekonomi Islam bahwa barang-barang yang terkena pailit adalah semua barang atau harta kekayaan debitor pailit yang mempunyai nilai tinggi (barang-barang sekunder) dan bukan barang-barang yang sangat

dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia (barang-barang primer).

4. Menurut hukum perundang-undangan Indonesia dan hukum ekonomi Islam bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan masalah kepailitan adalah Pengadilan Niaga, kecuali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak (debitor dan kreditor), maka masalah kepailitan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
5. Menurut hukum perundang-undangan Indonesia bahwa seorang hakim tidak boleh intervensi dalam menyelesaikan masalah, sedangkan menurut hukum ekonomi Islam seorang hakim boleh berintervensi dalam menyelesaikan masalah antara debitor dan kreditor selama demi kemaslahatan bersama.
6. Menurut hukum perundang-undangan Indonesia bahwa debitor yang sudah dinyatakan pailit harus diawasi secara terus menerus baik oleh kurator, panitia kreditor maupun hakim pengawas, sedangkan menurut hukum ekonomi Islam bahwa debitor meskipun sudah dinyatakan pailit tidak perlu diawasi secara terus menerus, melainkan diberikan kesempatan untuk mencari rizki sampai ia mampu membayar atau melunasi utangnya, bahkan kalau perlu dibebaskan dari segala utang-utangnya (sebagai infak).
7. Menurut hukum perundang-undangan Indonesia dan hukum ekonomi Islam bahwa akibat kepailitan menyebabkan debitor pailit demi



hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

8. Menurut hukum ekonomi Islam dan hukum perundang-undangan Indonesia bahwa ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan debitor adalah persyaratan pernyataan pailit melindungi debitor yang solven, perdamaian mengakhiri kepailitan dan debitor dibebaskan dari pengampuan, serta pembebasan utang debitor dilakukan atas dasar keikhlasan kreditor.

## **B. Saran (Rekomendasi)**

Sebagai implikasi konseptual maupun praktis dari hasil studi di atas dapatlah disarankan atau direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada pihak kurator, panitia kreditor dan hakim pengawas disarankan agar tidak mengawasi debitor pailit secara terus menerus selama kedudukan debitor tersebut jelas, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk berusaha (mencari rizki) dan mampu untuk membayar atau melunasi utang-utangnya kepada kreditor.
2. Terhadap debitor pailit yang sudah tidak berdaya, setelah dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas, hendaknya diberikan keringanan, bahkan kalau perlu dibebaskan dari segala utang-utangnya. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Baqarah yat 280.
3. Mengingat peran hakim dalam penyelesaian kepailitan sangat penting, maka hendaknya seorang hakim dapat bertindak profesional, arif dan bijaksana serta berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan

(memutuskan perkara), sehingga tidak merugikan salah satu pihak (debitor atau kreditor) dan tetap memperhatikan kemaslahatan bersama.

4. Mengingat masalah kepailitan semakin meningkat di seluruh Indonesia, maka sebaiknya di setiap kota atau kabupaten didirikan Pengadilan Niaga.
5. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sedangkan sistem hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia banyak yang bersumber dari hukum barat. Oleh sebab itu dalam rangka pembinaan hukum nasional, diharapkan hukum ekonomi islam (bisnis syariah) mampu mewarnai hukum nasional Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ictiar Baru Van Hoeven, Jakarta.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, 1975, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta. Ali, Daud, 1991, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta.
- Al-As-Qalani, Ibnu Hajar, 1995, *Bulughul Maram Adilla fi al-Ahkam*, Darul Fikr, Beirut.
- Al Qordawi, Yusuf, 1998. *Hukum Zakat*, Gema Insani dan Mizan, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Carlson, David Gray, "Bankruptcy's Organizing Principle," 26 Fla. St. U. L. Rev. 54? (1999), hal. 549 - 551.
- Departemen Agama RI, 1989, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Path, Ahmad Abu, 1953, *Kitab Al Mu'ammalat fi al-Syari'ah al-hlamiyah wa al-Qawanin al-Misriyah*, Juz I, Al Busfur, Mesir.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Haydar, Ali, *Dumu al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam*, vol. 2 (Beirut - Lebanon: Daral-Jayl, n.d.), hal.669.
- Hadi, Sutrisno, 1984, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hartono, Siti Sumantri, 1983, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Hic, Jonadian, "Foxes Guarding the Henhouse: The Modern Best Interests of Creditors Test in Chapter 11 Reorganizations," 5 Nev. L.J. 820 (2005), hal 821, 828. Lihat pula Timothy C.G. Fisher, Jocelyn Martel, "Does It Matter How Bankruptcy Judges Evaluate the Creditors' Best-Interests Test?" 87 Am. Bankr. LJ. 497 (2007), hal. 497- U.S.C. § 1129 (a) (7) (A), mengatur bahwa



- Pengadilan akan mengesahkan perdamaian apabila, *interalia*, "dipenuhi bahwa... perdamaian adalah untuk kepentingan terbaik semua pihak yang terkait dengan proses ini"
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, 1995, *Kifayah al-Akhyar fit Halli Ghayah al-Ikhtisar*, alih bahasa KH. Syarifuddin dan KH. Misbah Mustafa, Bina Iman, Surabaya.
- Ismail, Imam Abi Abdillah Muhammad bin, tt, *Shaheh al-Bukhari*, Jilid II, Maktabatul Dahlan Indonesia.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin M. al-Husaini, 1995, *Kifayah al-Akhyar fii Halli Ghayah al-Ikhtisar*, alih bahasa KH. Syarifuddin dan KH. Misbah Mustafa, Bina Imam, Surabaya.
- Ja'far, A. Khumaidi, 2005, *Kapita Selekta Filsafat Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, Bandar Lampung.
- Ka'bah, Rifyal, 1999, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta.
- Kartono, 1985, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Khallaf, Abdul Wahab, 1972, *Ilmu Ushul Fiqh*, MajUsil A'la Indonesiyyi Al-Da'wah al-Islamiyah, Jakarta.
- Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 171/1998/PerOVPT Tanggal 14 Desember 1998.
- Lontoh, Rudy, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, Ibrahim, 1995, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jilid II, Kalam Mulid, Jakarta.
- Levinthal, Louis, *The Early...*, dalam Charles J. Tabb, *Bankruptcy And diology*, *lac. cit.*
- Markell, Bruce A. "Clueless On Classification: Toward Removing Artificial Limits On Chapter II Claim Classification," *U Bnkr. Dev.J. I* (1994-1995), hal. 6 -8
- Mahfud, A. Sahul dan A. Mustafa Bisri, 1987, *Ensiklopedia Ijmak-Kesepakatan Ulama Dalam Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta



- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1997, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku ii, PPT, Yustisial, Jakarta.
- Mansyur, Kahar, 1991, *Fiqih Sunah Pengadilan/Waris*, Jilid 14, Kalam Mulia, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 1994, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Muhammad bin al-Syaukani, tt, *Naylul Author*, Juz V, Mustafa Babil Halbi, Mesir.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir, Fuady, 1986, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Musa, Muhammad Yusuf, 1983, *Al-Madkhal Lidirasatil Fiqh Al Islami*, Dar Al Fikr Al 'Araby, Beirut.
- Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung. Ramulyo, Moh. Idris, 2004, *Asas-asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta. Rifai, Moh, 1978, *Hmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang.
- Rusyd, Ibnu, 1995, *Bidayah al-Mujtahid, Jilid 4*, Alih Bahasa, Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman, 1976, *Fiqih islam*, al-Tahiriyah, Jakarta. Simorangkir, J.C.T, dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sastropranoto, Simorangkir dan Woerjono, 1984, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Siddiqi, Muhammad Nejarullah, 1991, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Situmorang, Viktor M dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami FaiUissments Verordening junkto Undang-Undang No.4 Tahun 1988*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 115



- Sholih, Abdul Ghafar, *Al Afluasti al-islamiyah*, Diaraasah Muwaaranah, As-S'adah, Mesir, 1980 hal. 67
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, R, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Mu'amalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukardono, R, 1982, *Hukum Dagang Indonesia Kapita Selekta*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sulaiman, Abu Dawud, tt., *Sunan Abu Dawuud*, Juz III, Maktabah al-Dahlan Indonesia, Jakarta.
- Suparni, Naniek, 1994, *KUHD dan Kepailitan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparni, Naniek, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarif, Amiroeddin, 1997, *Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syaltout, M dan M. Ali As-Sayis, 1973, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Alih Bahasa H. Ismuha, Bulan Bintang, Jakarta.
- Tabb, Charles Jordan, "The History of die Bankruptcy Laws in the United States," 3 *Am. Bankr. fast. L. Rev.* 5(1995), hal.
- Tirtaamidjaya, M.H., 1970, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta.
- Tunggal, Hadi Setia, 2005, *Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Harvarindo, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Usman, Rahmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



- Wignjodipuro, Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Waluyo, Bemadette, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV Mandar Maju, Bandung,
- Widjaja, Gunawan, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yam, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ya'qub, Hamzah, 1992, *Fiqh Mu'amalah Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung.

